

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Karena pembangunan daerah merupakan salah satu indikator atau penunjang dari terwujudnya pembangunan nasional. Sejak tanggal 1 Januari 2001 telah terjadi perubahan yang cukup fundamental dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perubahan tersebut terutama terkait dengan dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 32 tahun 2004 yang direvisi dengan UU No. 23 tahun 2014 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 33 tahun 2004. Kedua undang-undang dibidang otonomi daerah tersebut telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah.

Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada prinsipnya kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan ketergantungan daerah terhadap pusat berkurang, sehingga mampu dicapai kinerja keuangan daerah yang baik seiring tercapainya tujuan otonomi itu sendiri.

Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana APBD secara transparan, efisien, efektif, dan

akuntabel. Berkaitan dengan hal itu, analisis terhadap kinerja keuangan merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Menurut Halim (2007) kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Salah satu elemen dari APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (Halim, 2007). Hasil analisis rasio keuangan

selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, efisiensi, dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, serta pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah kabupaten/kota masih sangat terbatas, sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Pramono, 2014).

Kota Padangpanjang adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberikan otonomi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah tersebut serta menghasilkan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Kota Padangpanjang merupakan kota yang berada pada jalur silang dan terhubung dengan jalur lintas Sumatera. Menjadikan kota ini berada pada posisi yang cukup strategis karena terletak pada lintasan regional antara Kota Padang dengan Kota Bukittinggi, juga dengan Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan Kota Solok.

Kota ini juga merupakan pertemuan jalur kereta api dari Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Solok yang akan menuju Kota Padang atau sebaliknya, percabangan jalur kereta api ini terdapat pada Stasiun Padangpanjang. Secara

topografi kota ini berada pada dataran tinggi yang bergelombang, di mana sekitar 20.17% dari keseluruhan wilayahnya merupakan kawasan relatif landai (kemiringan di bawah 15%), sedangkan selebihnya merupakan kawasan miring, curam dan perbukitan, serta sering terjadi longsor akibat struktur tanah yang labil dan curah hujan yang cukup tinggi. Namun pada kawasan yang landai di kota ini merupakan tanah jenis andosol yang subur dan sangat baik untuk pertanian. Berikut adalah gambaran Pendapatan Asli Daerah Kota Padangpanjang tahun 2011-2015:

Tabel 1.1
Tabel Pendapatan Asli Daerah Kota Padangpanjang Tahun 2011-2015

Tahun	PAD
2011	30.507.444.998,03
2012	32.420.607.300,28
2013	41.513.488.241,83
2014	51.601.386.498,33
2015	53.068.561.858,50

Sumber: DPPKD Kota Padangpanjang

Dari data diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kota Padangpanjang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2011-2015. Dari data pendapatan asli daerah (PAD) tersebut menunjukkan pada tahun 2011 merupakan pendapatan asli daerah terendah di Kota Padangpanjang yaitu sebesar Rp30.507.444.998,03. Tahun 2012 terjadi kenaikan sebesar Rp1.913.162.302. Tahun 2013 terjadi juga kenaikan sebesar Rp9.092.880.942. Kemudian tahun 2014 meningkat sebesar Rp10.087.898.257 dan tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar Rp1.467.175.360. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan PAD yang bersumber dari kelompok pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Pemerintah Kota Padangpanjang terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk pembangunan daerahnya dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah dilihat dari berbagai aspek yaitu mampu memanfaatkan potensi daerahnya dengan salah satu cara melalui pemanfaatan semaksimal mungkin atas sumber daya daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah. PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kinerja keuangan daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat berkurang.

Alasan penulis memilih Kota Padangpanjang sebagai objek penelitian karena Kota Padangpanjang merupakan Kota terkecil di Provinsi Sumatera Barat dan merupakan penghubung perjalanan lintas Sumatera, namun sebenarnya memiliki begitu banyak potensi yang dapat dikembangkan seperti wisata baik itu wisata religius, tradisional, modern, dan kuliner serta pertanian, peternakan, sumber mata air pegunungan, industri kulit dan kapur, yang mana potensi tersebut akan bisa menjadi basis pengembangan ekonomi lokal. Oleh karena hal tersebut, penulis ingin mengetahui sejauh mana kinerja keuangan Kota Padangpanjang dalam memanfaatkan potensi yang ada dalam menjalankan otonomi yang diberikan.

Pada penelitian kali ini penulis berpedoman kepada beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Masita dkk (2014), Sonia Fambayun (2014), Oesi Agustina (2013), Joko Pramono (2014), dan beberapa penelitian lainnya. Yang mana, mereka menggunakan beberapa rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah diantaranya rasio kemandirian,

efektivitas, ketergantungan, DSCR, keserasian dan derajat desentralisasi fiskal. Ada beberapa rasio yang menunjukkan nilai positif atau baik dan ada beberapa rasio yang sering kali bernilai negatif atau rendah disetiap penelitian. Yang mana, menunjukkan pemerintah daerah masih sangat kurang dalam kinerja keuangannya. Rasio-rasio tersebut adalah rasio kemandirian, rasio efektivitas, ketergantungan dan derajat sentralisasi fiskal. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menggunakan empat rasio tersebut yang merupakan bagian dari rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan Kota Padangpanjang.

Terdapat beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini. Perbedaan itu terletak pada objek atau daerah penelitian, tahun penelitian, dan rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan. Pada penelitian kali ini penulis ingin menyempurnakan rasio yang digunakan, karena pada penelitian terdahulu kebanyakan hanya menggunakan beberapa rasio keuangan saja. Pada penelitian kali ini penulis bermaksud akan menggunakan analisis rasio berupa:

1. Analisis kinerja pendapatan yang terdiri dari: analisis varians pendapatan, analisis rasio pertumbuhan pendapatan, dan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini terdiri dari rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio efektivitas dan rasio derajat desentralisasi fiskal sesuai alasan yang penulis jabarkan sebelumnya.
2. Analisis kinerja belanja yang terdiri dari: analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, dan analisis efisiensi belanja.
3. Analisis pembiayaan

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Kota Padangpanjang Tahun 2011-2015 ”.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, muncul beberapa masalah yang akan menjadi topik bahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kinerja keuangan Kota Padangpanjang tahun 2011-2015 dilihat dari analisis kinerja pendapatan?
2. Bagaimanakah kinerja keuangan Kota Padangpanjang tahun 2011-2015 dilihat dari analisis kinerja belanja?
3. Bagaimanakah kinerja keuangan Kota Padangpanjang tahun 2011-2015 dilihat dari analisis pembiayaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Kota Padangpanjang tahun 2011-2015 dilihat dari analisis kinerja pendapatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Kota Padangpanjang tahun 2011-2015 dilihat dari analisis kinerja belanja.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Kota Padangpanjang tahun 2011-2015 dilihat dari analisis pembiayaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pemerintah Daerah Kota Padangpanjang

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan bahan pertimbangan dan masukan untuk perkembangan kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan.

2. Bagi masyarakat umum

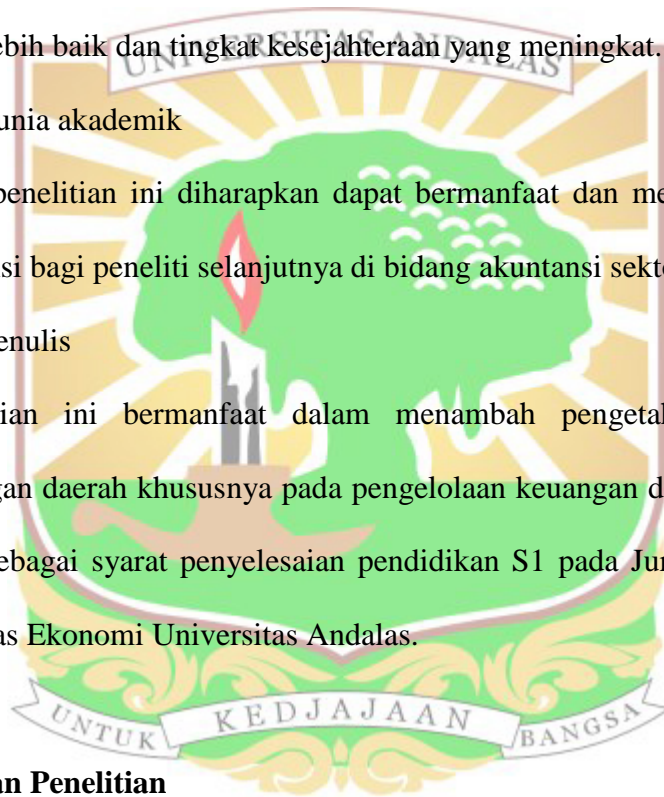
Dengan memberikan hasil yang dapat membantu pihak pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja, maka masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih baik dan tingkat kesejahteraan yang meningkat.

3. Bagi dunia akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya di bidang akuntansi sektor publik.

4. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat dalam menambah pengetahuan mengenai keuangan daerah khususnya pada pengelolaan keuangan daerah itu sendiri serta sebagai syarat penyelesaian pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.



1.5 Batasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan terbatas pada analisis kinerja pendapatan, kinerja belanja, dan kinerja pembiayaan keuangan daerah Kota Padangpanjang berdasarkan Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011-2015.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isi dari skripsi ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan/ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi dari penelitian ini.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai otonomi daerah, keuangan daerah, sumber pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, konsep kinerja, APBD dan analisis kinerja keuangan daerah yang terdapat dalam penelitian ini.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan desain penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan tahap pengujian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV : Analisis dan Pembahasan

Bab ini membahas analisis pengolahan data serta pembahasannya yang merupakan interpretasi dari hasil pengolahan data tersebut. Interpretasi hasil penelitian ini akan memberikan jawaban atas permasalahan dari penelitian ini.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan serta keterbatasan dari penelitian yang dilakukan dan juga saran-saran untuk referensi penelitian selanjutnya.

